



Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development di Kabupaten Trenggalek

Agus Wahyudi¹, Lunariana Lubis^{1*}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah Surabaya

*Korespondensi: lunariana.lubis@hangtuah.ac.id

Info Artikel

Diterima 25
Mei 2023

Disetujui 16
Oktober 2023

Dipublikasikan 13
November 2023

Keywords:
Keberlanjutan
Pembangunan,
Wilayah Pesisir,
Teluk Prigi

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Salah satu wilayah pesisir di Jawa Timur adalah Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Strategi pengembangan wilayah pesisir pada Kab Trenggalek tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Trenggalek Tahun 2012-2032. Penelitian berikut memakai metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus serta berfokus pada keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir pada Kecamatan Watulimo Kab. Trenggalek. Data didapatkan menggunakan obsevasi, dokumentasi, serta wawancara dengan kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek) juga masyarakat pada lingkungan pantai Prigi Kab. Trenggalek. Teknik analisa data menggunakan model interaktif yaitu mengumpulkan data, kondensasi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh bahwa keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir di Kec. Watulimo Kab. Trenggalek mencakup (1) ekologi, Keberadaan Teluk Prigi memberi manfaat pada bidang Pariwisata, Perikanan dan Kelautan yakni Pantai Prigi, Pantai Damas, Pantai Cengkron, Hutan Wisata Mangrove, Pantai Pasir Putih Karanggongso serta Pantai Mutiara. (2) ekonomi, Rendahnya pendapatan nelayan pada daerah Prigi diberikan pengaruh oleh kondisi alam juga, yang menjadikan kegiatan menangkap ikan tak bisa terlaksana sepanjang tahun serta (3) sosial, Program pemberdayaan masyarakat nelayan pada daerah Prigi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan peningkatan pada masyarakat nelayan namun program itu belumlah berjalan optimal.

Abstract

One of the coastal areas in East Java is Watulimo District, Trenggalek Regency. The strategy for developing coastal areas in Trenggalek Regency is contained in Regional Regulation (Perda) no. 15 of 2012 concerning District Spatial Planning Plans. Trenggalek 2012-2032. The following research uses qualitative research methods through a case study approach and focuses on the sustainability of coastal area development in Watulimo District, Kab. Trenggalek. Data was obtained using observation, documentation, and interviews with the head of Bappeda (Regional Development Planning Agency for Trenggalek Regency) as well as the community in the coastal area of Prigi Regency. Trenggalek. The data analysis technique uses an interactive model, namely collecting data, condensing data, presenting data and drawing conclusions. The results obtained show that the sustainability of coastal area development in the district. Watulimo District. Trenggalek covers (1) ecology, the existence of

Prigi Bay provides benefits in the tourism, fisheries and marine sectors, namely Prigi Beach, Damas Beach, Cengkrong Beach, Mangrove Tourism Forest, Karanggongso White Sand Beach and Mutiara Beach. (2) economic, the low income of fishermen in the Prigi area is influenced by natural conditions as well, which means that fishing activities cannot be carried out throughout the year and (3) social, the fishing community empowerment program in the Prigi area which has been carried out by the Government to provide improvements to fishing community but the program has not run optimally.

1. Pendahuluan

Wilayah pesisir yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, hendaknya memiliki aturan tentang kebijakan yang hendaknya berkelanjutan, melakukan penataan ruang itu sendiri tentu wajib memberikan perhatian lebih kepada kondisi geografis, sosial budaya misalnya demografi, sebaran penduduk, juga aspek potensial dan strategis lainnya (Ekosafitri et al., 2017). Hasil dari pelaksanaan penataan ruang berikut dikehendaki mampu memberikan perwujudan akan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development* yang sanggup menjadikan berpadunya pilar ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan pemerataan pembangunan. Aspek keberlanjutan pada sebuah pembangunan itu penting supaya terlaksana adanya pemerataan pembangunan antar generasi di masa saat ini ataupun yang akan datang (Trinanda, 2017). Pada UU No. 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ialah sebuah serangkaian analisis yang sistematis, keseluruhan serta partisipatif guna memberikan pemastian bahwasanya prinsip pembangunan berkelanjutan sudah menjadi dasar serta terintegrasi untuk pembangunan dari sebuah wilayah serta kebijakan, rencana serta program (Marliana et al., 2013).

Wilayah pesisir dengan berbagai ekosistem didalamnya merupakan daerah yang produktif dan dilakukan pemanfaatannya guna bermacam-macam aktivitas pembangunan, yang menjadikan wilayah pesisir rentan terpengaruh pembangunan (Rizal, 2013). Beriringan bersama bertumbuhnya penduduk secara pesat, keberadaan wilayah pesisir menjadi padat permukiman yang memiliki bermacam-macam kegiatan pembangunan yang kerap kali tumpang tindih ketika dilakukan pemanfaatannya, yang menjadikan timbulnya masalah-masalah sosial serta lingkungan hidup (Lasabuda, 2013).

Keberadaan Teluk Prigi yang terdapat pada Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisah dari masyarakat serta Pemerintahan Kab. Trenggalek sebab sudah memberikan kemanfaatan pada bidang Pariwisata, Perikanan serta Kelautan (Fisu, 2017). Teluk Prigi mempunyai banyak objek wisata yang menarik guna dilakukan kunjungannya oleh wisatawan domestik serta manca negara, mulai dari Pantai Prigi, Pantai Damas, Pantai Cengkrong, Hutan Wisata Mangrove, Pantai Pasir Putih Karanggongso dan Pantai Mutiara. Akan tetapi, sering kali ada sebuah pelanggaran di daerah kawasan pesisir seperti yang terjadi di Pantai Prigi berwujud eksploitasi SDA yaitu pengerukan pasir pantai yang dilaksanakan oleh warga di sekitarnya guna melakukan pemenuhan pada kebutuhan hidup. Apabila persoalan itu sendiri secara berkelanjutan dilaksanakan serta tak terdapat sebuah usaha untuk menangani secara serius dari pihak pemerintahan, ada sebuah

kekhawatiran bisa menjadikan langkanya sumber daya hayati pada kawasan pesisir itu sendiri dan juga bisa menjadikan adanya konflik yang tidak bisa dikendalikan pada kalangan masyarakat tersebut sebab mempunyai setiap kepentingannya.

Pembangunan kawasan Prigi yang telah dilakukan pemerintah pusat sejak tahun 2001 dengan bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan pelayanan perikanan. Pada kenyataannya belum memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional karena cenderung berorientasi pada target ekonomis yakni target pendapatan daerah di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini terlihat pada jenis kegiatannya yang lebih memihak pada pengusaha di bidang kelautan dan perikanan seperti pembangunan pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan fasilitas keperluan operasi penangkapan ikan (Hariyanto, 2014).

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh Brundtland Commission (1987) adalah suatu pembangunan yang memiliki jangkauan pada segala kebutuhan individu pada masa mendatang dengan tidak meninggalkan potensi generasi yang akan datang dalam rangka meraih semua kebutuhannya. Pembangunan yaitu pembangunan jangka panjang yang memiliki fokus dalam prinsip guna mempertahankan keberlanjutan dukungan alam kepada kehidupan manusia secara individu, kehidupan sosial serta budaya manusia, juga aktivitas ekonomi manusia untuk memberikan pemenuhan pada kebutuhan hidup generasi saat ini juga pada generasi yang akan datang. Guna mewujudkannya maka pembangunan berkelanjutan hendaknya dilaksanakan dengan inklusif dan membutuhkan partisipasi bermacam pemangku kepentingan yang selama ini mempunyai banyak perbedaan ataupun sampai dengan sering bertolak belakang guna melaksanakan rekonsiliasi menuju sintesis baru dengan sinergis melaksanakan aksi bersama dan juga bekerjasama guna meraih tujuan bersama pembangunan berkelanjutan (Rimadevi et al., 2022).

Pembangunan yang berkelanjutan (Sompotan, 2016) pada dasarnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan ambang batas (limit) pada ekosistem alamiah secara sumber daya yang ada didalamnya. Ambang batas ini tidaklah bersifat mutlak (absolut), melainkan tidak kaku (fleksibel) yang tergantung pada kondisi teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumber daya alam, secara kemampuan biosfer untuk menerima dampak kegiatan manusia. Dengan kata lainnya, pembangunan berkelanjutan adalah suatu strategi pemanfaatan ekosistem alamiah sedemikian rupa, sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia tidak hancur.

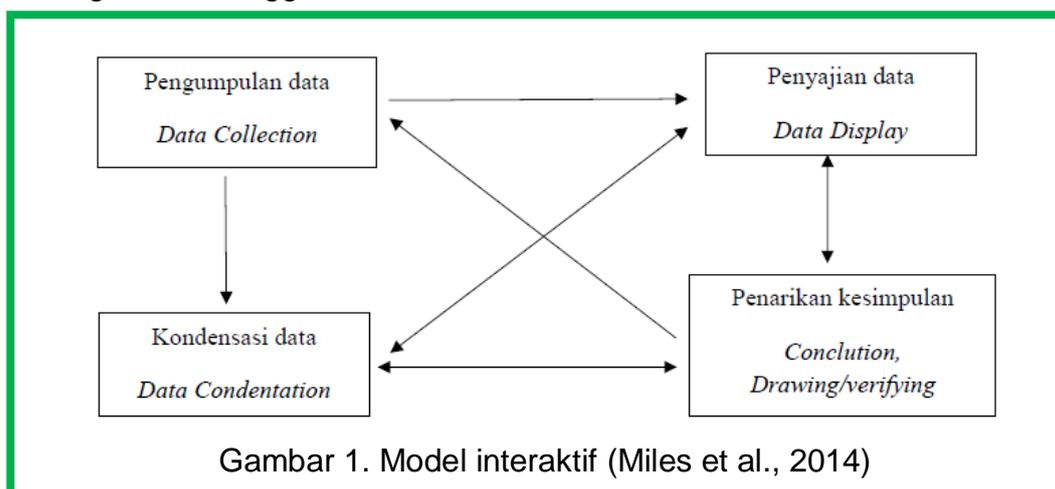
Konsep mengelola wilayah pesisir dengan sustainable memiliki fokus terhadap karakteristik dari ekosistem pesisir yang berkaitan, yang dilakukan pengelolaannya melalui memberikan perhatian kepada aspek parameter lingkungan, konservasi, serta kualitas hidup dari warga sekitar, yang kemudian dilakukan identifikasi dengan komprehensif serta terpadu menggunakan kerja sama masyarakat, ilmuwan serta pemerintahan, guna melakukan strategi-strategi pengelolaan pesisir secara tepat (Kristian, 2019). Hasil penelitian Kristian (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik wilayah itu sendiri yang merupakan kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial. Strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumber daya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Oleh karena itu pada perencanaan wilayah pesisir, dimungkinkan pengambilan keputusan

diarahkan pada pemeliharaan untuk generasi yang akan datang (pembangunan berkelanjutan). Pada proses pengelolaan kawasan pesisir yang meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi, harus melibatkan minimal tiga unsur yaitu akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Proses alam lingkungan pesisir dan perubahan ekologi hanya dapat dipahami oleh akademisi dan kemudian pemahaman tersebut menjadi basis pertimbangan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku dan tujuan meningkatkan sosial ekonomi kawasan.

Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun daerah sebagian masih belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini akan mempengaruhi pada kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Penyebab degradasi kawasan pesisir secara tidak langsung juga diakibatkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir. Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak lingkungan pada beberapa daerah juga berpengaruh terhadap ekosistem dipesisir. Perizinan pengembangan usaha bagi kelangan dunia usaha selama ini sebagian besar menjadi kewenangan pusat. Kadangkala dalam hal ini pemberian izin tersebut tanpa memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat setempat (Nengsih, 2020).

2. Metode Penelitian

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan tempat tersebut merupakan wilayah pesisir yang mempunyai sumber daya untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Penelitian berikut memakai metode penelitian kualitatif (Creswell, 2015) menggunakan pendekatan studi kasus (Yin, 2008) yang menayangkan seluruh fakta empiris dengan naturalistik tentang keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir pada Kab. Trenggalek. Pengumpulan data peneliti memakai aktivitas observasi dengan mengamati langsung secara formal maupun informal mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan wilayah pesisir di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dokumentasi guna mendapatkan data primer ataupun sekunder yang diperlukan berupa Peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, arsip dan dokumen-dokumen lain terkait pembangunan wilayah pesisir Kab. Trenggalek. Wawancara juga dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung bersama kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek) juga masyarakat pada lingkungan pantai Prigi Kab. Trenggalek.



Teknik analisis data dalam penelitian berikut memakai model interaktif (Miles et al., 2014) yakni pengumpulan data, kondensasi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data-data terkait penelitian dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kondensasi dengan mereduksi, merampingkan serta memilih data, serta memilih data yang sesuai topik penelitian. Dalam penyajian, data yang telah terkumpul kemudian disusun untuk dianalisa dan kemudian ditarik kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Model pembangunan berkelanjutan yang diketahui sebagai *sustainable development* yang memiliki kandungan akan 3 unsur utama yang mencakup dimensi ekonomi, ekologi serta sosial (Harris et al., 2001). Sebuah pembangunan pada kawasan pesisir, pertama dengan ekonomi dirasa berkelanjutan (*economic growth*) apabila kawasan itu sendiri sanggup memberikan output hasil yakni barang serta jasa dengan adanya kesinambungan; kedua dari segi ekologis dirasa berkelanjutan (*ecological sustainability*) mana kala basis ketersediaan sumber daya alam bisa dilakukan pemeliharannya dengan stabil, tak terjadi eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam yang bisa dilakukan pembaharuannya, tak ada pembuangan limbah melebihi kapasitas asimilasi lingkungan yang bisa menjadikan tercemarnya keadaan lingkungan, dan juga memanfaatkan sumber daya yang tak bisa dilakukan pembaharuannya yang berbarengan bersama berkembangnya bahan substitusi dengan mencukupi, serta ketiga dengan sosial dinilai berkelanjutan (*social equity*) jika kebutuhan dasar akan keseluruhan penduduk sudah dipenuhi; adanya distribusi pendapatan serta peluang melakukan usaha dengan adil.

Kab. Trenggalek sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, merupakan daerah yang relatif tertinggal perkembangannya dibandingkan dengan kabupaten lainnya di daerah Jawa Timur. Selain memiliki PAD terendah diantara Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur, juga terletak di daerah yang relatif kurang strategis bagi akses perdagangan dan pembangunan. Tetapi Kab. Trenggalek memiliki wilayah pantai yang relatif panjang yaitu di bagian selatan. Wilayah pantai tersebut sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk dikelola agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dan dikembangkan untuk kepentingan kemakmuran mereka. Masyarakat pesisir di wilayah selatan (Hindrajit et al., 2015).

Kec. Watulimo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kab. Trenggalek memiliki potensi yakni (1) pertanian yang berwujud padi serta tanaman palawija yakni Ubi Kayu, Jagung, Kedelai serta Kacang Tanah. (2) industri yang berwujud industri batu koral, industri anyaman, industri Pengolahan Ikan sebanyak, industri Komponen Bangunan juga Furniture, serta industri yang lain. (3) pariwisata yang berwujud wisata alam serta budaya. Berdasarkan potensi tersebut, daerah kec. Watulimo yang ialah suatu wilayah pesisir amat berpotensi guna serta dilakukan pemanfaatannya dengan berkelanjutan.

3.2. Pembahasan

Keberlanjutan Ekonomi

Kabupaten Trenggalek, sebuah daerah yang berlokasi pada pantai selatan Jawa Timur yang mempunyai aktivitas laut yang bergaris pantai ±96 km. Sebagian

pantai memiliki bentuk teluk yakni meliputi Teluk Panggul pada Kec. Panggul, Teluk Munjungan pada Kec. Munjungan serta yang terbesar ialah Teluk Prigi pada Kec. Watulimo (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2009). Pertumbuhan sektor perikanan serta pariwisata berlokasi pada selatan Kab. Trenggalek yakni Pantai Prigi.



Gambar 2. Aktivitas nelayan di Pantai Prigi

Aktivitas nelayan yang ada di Pantai Prigi. Rendahnya pendapatan nelayan pada daerah Prigi diberikan pengaruh juga oleh keadaan alam, yang menjadikan tahapan ditangkapnya ikan tak bisa terlaksana sepanjang tahun. Di saat-saat khusus nelayan tak pergi melaut dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: angin kencang, gelombang besar serta arus laut yang kuat. Kondisi tersebut sering kali dinamakan musim paceklik yakni sebuah musim di mana nelayan tak melakukan aktivitas. Sedangkan guna melakukan pemenuhan pada kebutuhan hidupnya, nelayan meminjam uang ataupun menjual barang berharga yang dipunya. Pinjaman kemudian dibayarkan ketika musim menjadi lebih baik serta hasil tangkapan ikan banyak. Terdapat sebuah kesepakatan bahwa nelayan melakukan penjualan pada hasil tangkapannya seperti harga yang sudah ditetapkan oleh juragan ataupun pedagang yang meminjamkan uang. Pengaruh dari timbal balik yang buruk antara nelayan bersama juragan ataupun tengkulak ialah ketika datangnya musim ikan nelayan tak memperoleh hasil yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan, utang tak dapat dilunasi serta bertumpuk sebab di musim paceklik selanjutnya nelayan kembali berhutang.

Pembangunan kawasan pada daerah Prigi yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat di tahun 2001, sesungguhnya memiliki tujuan guna memberikan peningkatan serta melakukan pengembangan pada fungsi serta layanan perikanan. Pada Pantai Prigi sudah dilakukan pembangunannya sarana serta pra sarana untuk menunjang aktivitas perikanan, yakni: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. PPN Prigi berfasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yakni TPI barat (940 m²) yang dilakukan pemanfaatannya guna pendaratan kapal yang berkapasitas lebih dari 15 GT serta TPI timur (400 m²) yang dilakukan pemanfaatannya guna mendaratkan kapal yang berkapasitas kurang dari 15 GT. Namun pembangunan tersebut belum berkostribusi untuk mensejahterakan nelayan tradisional sebab condong memiliki orientasi terhadap target dengan ekonomis pada sasaran ataupun target pendapatan daerah dari sektor kelautan dan perikanan.

Kenyataan tersebut terlihat dari jenis aktivitas yang lebih berpihak kepada golongan kapitalis ataupun pengusaha di bidang kelautan serta perikanan, misalnya pembangunan pelabuhan, lokasi pelelangan ikan serta fasilitas keperluan operasi

penangkapan ikan. Sedangkan pembangunan Kawasan pada daerah Prigi hanyalah memberikan penekanan terhadap hanya aspek fisik, serta belum banyak berkontribusi pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang terdapat pada sekitar Prigi. Persoalan itu sendiri bisa diamati berdasarkan kegiatan dibangunnya tempat pelelangan ikan.

Konsep pembangunan berkelanjutan secara ekonomi mensyaratkan, bahwa manfaat (keuntungan) yang diperoleh dari kegiatan penggunaan suatu wilayah pesisir serta sumber daya alamnya harus diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar kegiatan (proyek) tersebut, terutama pada mereka yang ekonomi lemah, guna menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan secara ekonomi di Kec. Watulimo Kab. Gresik belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya pendapatan masyarakat di Kec. Watulimo yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Keberlanjutan Ekologis

Keberadaan Teluk Prigi yang terdapat pada Kec. Watulimo Kabupaten Trenggalek memberi manfaat di bidang Pariwisata, Perikanan dan Kelautan. Teluk Prigi mempunyai banyak obyek wisata yang menarik guna dihampiri oleh Wisatawan Domestik bahkan Manca negara yaitu Goa Lawa, Pantai Prigi, Pantai Damas, Pantai Cengkong, Hutan Wisata Mangrove, Pantai Pasir Putih Karanggongso serta Pantai Mutiara.

Satu di antara beberapa tujuan wisata di Teluk Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yaitu hutan mangrove yang terletak di di pesisir Pantai Cengkong dan Damas. Walaupun objek wisata yang terdapat pada Kec. Watulimo tersebut masih terbilang belum lama serta terdapat pada wilayah Perhutani, dikembangkannya objek wisata hutan mangrove Pancer pada pesisir Pantai Cengkong diharap memiliki dampak yang positif pada bidang perekonomian warga di sekitarnya.



Gambar 3. Wisata hutan mangrove Pancer di Pantai Cengkong

Wisata hutan mangrove Pancer yang berlokasi pada muara Sungai Pancer ialah satu dari dua destinasi wana wisata yang hendak dilakukan pengembangannya oleh Perhutani selaku kawasan ekowisata percontohan yang produktif. Kawasan pesisir yang berhiaskan hutan mangrove dengan luas ± 31 hektare serta masih bertempat pada wilayah pengelolaan Perhutani tersebut dirasa mempunyai nilai ekonomi wisata yang tinggi. Tak hanya lokasi geografis yang berdekatan bersama

objek wisata Pantai Prigi serta Pasir Putih yang lebih dahulu dikenal, namun mempunyai nilai jual yang tinggi sebab panorama hutan bakau yang terkenal.

Masyarakat Desa Karanggandu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek serta sekitarnya ialah satu di antara beberapa contoh kehidupan masyarakat yang melakukan pemanfaatan hutan mangrove selaku tumpuan hidupnya. Warga desa tersebut melaksanakan bermacam kegiatan ekonomi pada kawasan hutan yang terdapat pada kekuasaan negara. Ikatan yang terdapat antara masyarakat tani Desa Karanggandu serta sekitarnya Bersama LMDH Argo Lestari ialah hubungan yang tak bisa terpisahkan. LMDH Argo Lestari serta dibentuknya program-program kerja pada usaha memberikan peningkatan untuk mensejahterakan kaum tani. CV Pandu Alam ialah suatu badan hukum yang berdiri pada Kabupaten Trenggalek. CV Pandu Alam berdiri dengan tujuan memberikan peranan untuk melakukan pengelolaan pada pantai Cengkong, di mana CV Pandu Alam serta LMDH Argo Lestari melakukan kerjasama dengan Perhutani guna mengelola kawasan wisata hutan pantai Cengkong yang terletak di sebelah hutan mangrove milik Perhutani.

Luasan hutan mangrove di Teluk Prigi, Kabupaten Trenggalek telah mengalami penurunan yang signifikan. Awal mulanya, bisa dilakukan suatu identifikasi bahwasanya terdapat sejumlah 6 lokasi hutan mangrove pada Teluk Prigi (Susilo et al., 2015). Pertama terletak pada Karanggongso yang saat ini telah menjadi lokasi pemukiman penduduk. Nomor dua, pada Pancer Ledong, yang sekarang dipakai selaku lokasi (kawasan) pelabuhan perikanan. Nomor tiga, pada daerah Pancer Ngemplak, yang sekarang keadaannya tak baik sebab sedang terkena erosi aliran sungai. Nomor empat, Pancer Cengkong, sekarang tengah pada tahapan untuk memulihkan keadaan yang dilakukan pengolaannya oleh Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) "Kejung Samudra"; yang memiliki luasnya 87 ha. Nomor lima, pada Pancer Cengkong serta nomor enam pada Pancar Bang; dua-duanya menghadapi peralihan fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa, luas hutan bakau sekarang tinggal kurang dari 25% dari awalnya (luas semula ± 10 ha). Teluk Prigi ialah satu di antara beberapa tempat lokasi Cofish Project, yang terselenggara mulai dari tahun 1998/1999 hingga tahun 2005.

Pengamatan yang dilakukan pada tahun 2021 bahwasanya ancaman diturunkannya luasan mangrove pada Pancer Bang juga oleh abrasi pantai. Tahapan abrasi menjadikan dibawahnya pasir ke sungai dimana tumbuhan bakau terdapat pada tepian sungai itu sendiri. Usaha yang dilaksanakan oleh Lembaga Musyawarah Desa Hutan (LMDH) Argo Lestari guna mengeruk sungai serta menjadikan adanya tanggul penghalang gelombang tak sanggup mengatasi abrasi pantai. Sejumlah bibit mangrove yang dilakukan penyediannya oleh warga guna reboisasi sejumlah kurang lebih 1.500 batang, yang dilaksanakan di tahun 2011, pada 2013 masih ada. Namun saat bibit tak tersedia lagi.

Pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir berkelanjutan secara ekologis berarti bagaimana mengelola segenap kegiatan pembangunan yang terdapat di suatu wilayah berhubungan dengan wilayah pesisir agar total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsionalnya. Pengembangan wilayah pesisir Pantai Cengkong dan Damas sebagai hutan mangrove belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat. Masyarakat masih mememanfaatkannya secara ekonomis. Adanya sinergitas antara CV Pandu Alam serta LMDH Argo Lestari dengan Perhutani dalam mengelola kawasan wisata hutan pantai Cengkong diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk memanfaatkan hutan mangrove tidak saja

dari segi ekonomi. Pemanfaatan hutan mangrove selain untuk mencegah abrasi pantai juga dapat dijadikan obyek wisata alam.

Keberlanjutan Sosial

Ketika memberdayakan masyarakat nelayan pada daerah Prigi yang peranan masyarakatnya diwakili oleh LSM serta kelompok masyarakat. Berdasar dari fakta lapangan masyarakat memiliki sebuah peranan yang amat kecil bahkan keterlibatannya hanyalah menjadi formalitas. Pertama, berkaitan dengan peranan LSM untuk memberdayakan masyarakat nelayan pada daerah Prigi dimana LSM ialah wakil dari masyarakat nelayan tak diikutsertakan pada tahapan persiapan serta perencanaan program pemberdayaan. LSM hanyalah selaku penyelenggara program dari Dinas Kelautan dan Perikanan, peranan yang dilakukan LSM ialah bentukan dari dinas. Menggunakan wujud peranan dari dinas peranan LSM amatlah sempit yang menjadikan adanya kesulitan pada pergerakan LSM pada tahapan memberdayakan.

Kedua, kelompok masyarakat. Secara mendasar manusia tak dapat hidup sendiri sebab manusia ialah makhluk sosial. Dibentuknya sebuah kelompok untuk memberdayakan masyarakat nelayan bertujuan guna melakukan koordinasi pada masyarakat nelayan. Akan tetapi pada praktiknya tak seluruh nelayan bergabung pada kelompok. Persoalan tersebut disebabkan sebab kelompok yang tercipta bukanlah inisiatif warga, kelompok dibentuk sebab adanya program yang memberikan tuntutan harus tercipta suatu kelompok. Ketika memberdayakan masyarakat nelayan Prigi, keterlibatan masyarakat nelayan hanyalah selaku penikmat program, masyarakat tak berperan pada tahapan perencanaan, yang menjadikan tidak adanya jaminan akan keberlangsungan program ataupun amat rawan.

Banyaknya program pemberdayaan yang notabene selaku program yang berdasarkan keinginan serta kebutuhan masyarakat (*bottom up*), namun pada kenyataannya masyarakat tetap tak merasa mempunyai program-program itu sendiri yang menjadikan tak aneh banyak program yang hanyalah seumur masa proyek serta berakhir dengan tidak ada pengaruh yang berarti untuk kehidupan masyarakat.

Berkelanjutan secara sosial mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. Pembangunan berkelanjutan secara sosial melalui program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di Prigi belum optimal. Kesejahteraan masyarakat nelayan masih relatif sama sebelum dan setelah pemberdayaan. Segala kebutuhan nelayan dalam usaha perikanan yang dilakukannya dipenuhi oleh tengkulak dan rentenir sebagai pemilik modal atau sebagai penguasa usaha lokal. Sistem ini selain menjerat nelayan tradisional, juga memberikan kekuatan pandangan bagi nelayan bahwa menerima apa yang dibutuhkan dari tengkulak dan rentenir lebih mudah dan lebih leluasa dibandingkan dengan menerima bantuan bergulir dari program pemberdayaan.

4. Kesimpulan

Kabupaten Trenggalek ialah satu di antara beberapa bagian wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur yang mempunyai wilayah pesisir yang berpotensi guna dilakukan pengembangannya serta dipertahankan kelestarian lingkungannya di antaranya ialah Teluk Prigi yang mempunyai sejumlah lokasi wisata, di antaranya Pantai Prigi, Karanggongso, Mutiara, Damas, Cengkrong juga Hutan Mangrove. Pembangunan keberlanjutan secara ekologis, ekonomi serta sosial pada Kec. Watulimo Kab. Trenggalek belum optimal. Hal ini dikarenakan pembangunan belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Brundtland Commission. (1987). The World Commission on Environment and Development. In *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development* (Vol. 4). Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E., & Yulianda, F. (2017). Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 145. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.145-157>
- Fisu, A. A. (2017). Identifikasi Awal Lokasi Rencana Pelabuhan Di Teluk Prigi Kabupaten Trenggalek. *UPNVJ Journal*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/c82h6>
- Hariyanto, S. (2014). ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PANTAI PRIGI KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK. *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*, 2(1), 55–70. <http://jurnal-unita.org/index.php/bonorowo/article/view/31>
- Harris, J., Wise, T., Gallagher, K., & Goodwin, N. R. (2001). *A Survey of Sustainable Development : Social And Economic Dimensions*. Island Press.
- Hindrajit, Rianto, B., & Arieffiani, D. (2015). Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Pada Diversifikasi Usaha Pengolahan Ikan Tangkap Di Pesisir Selatan Kabupaten Trenggalek. *Seminar Nasional Kelautan X*.
- Kristian, I. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal Rasi*, 1(1).
- Lasabuda, R. (2013). PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL ILMIAH PLATAX*, 1(2), 92. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>
- Marliana, D., Sarwono, & Razikin, M. (2013). Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development di Kabupaten Sampang (Studi pada BAPPEDA Kabupaten Sampang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 80–86. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/96>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods*. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&printsec=frontcover&hl>

=id#v=onepage&q&f=false

- Nengsih, N. S. (2020). Penerapan indikator pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir dalam keanekaragaman hayati laut untuk mensejahterakan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 151–162.
- Rimadevi, G., Indah Mindarti, L., & Hanafi, I. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Pantai Ngliyep Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 184–192. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1246>
- Rizal, A. (2013). Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir (Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Akuatika Indonesia*, 4(2), 245181.
- Sompotan, H. B. (2016). Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(7), 1–7.
- Susilo, E., Purwanti, P., & Lestariadi, R. A. (2015). Keberlanjutan “Kejung Samudra” dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Mangrove Di Pancer Cengkong Dan Damas, Pantai Prigi, Trenggalek. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*, 5(2), 19–25.
- Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Matra Pembaruan*, 1(2), 75–84. <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/398/258>
- Yin, R. K. (2008). *Studi kasus desain dan metode*. Raja Grafindo Persada.